

# **PERILAKU PEMILIH BURUH DI KAWASAN INDUSTRI DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

**Oleh : Dwi Zahra Ramadhani**

**Pembimbing : Fadhiilatun Nisaa, M.I.P**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63277

## **ABSTRAK**

Buruh di kawasan industri menghadapi berbagai persoalan, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, percepatan masa pensiun, serta terbatasnya ruang untuk menyuarakan aspirasi politik. Kondisi ini menjadi latar penting dalam memahami perilaku politik buruh, khususnya dalam konteks Pemilihan Umum 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku pemilih buruh di kawasan industri dalam Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan tualang, Kabupaten Siak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data di kumpulkan melalui wawancara mendalam, serta FGD bersama serikat pekerja dan dokumentasi terhadap pekerja buruh yang berada di kawasan industri Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perilaku pemilih buruh terbentuk, sejauh mana rasionalitas memengaruhi pilihan mereka, serta bagaimana kondisi kerja dan posisi serikat pekerja turut membentuk dinamika partisipasi politik di kalangan buruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas buruh memilih secara rasional dengan mempertimbangkan visi-misi, program kerja, dan rekam jejak kandidat, sebagaimana dijelaskan dalam teori Pilihan Rasional Anthony Downs. Namun, ditemukan pula kecenderungan memilih karena kedekatan emosional atau identitas lokal, serta adanya pemilih kritis yang menolak politik uang. Dari sisi teori Polyarchy Robert A. Dahl, partisipasi buruh berlangsung cukup inklusif tanpa tekanan langsung dari perusahaan, namun akses politik masih terbatas akibat tidak adanya TPS di sekitar kawasan industri, serta keterbatasan ruang kampanye di tempat kerja. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perilaku politik buruh di kawasan industri tidak homogen, melainkan menunjukkan kombinasi antara rasionalitas, pragmatisme, dan keterbatasan struktural. Meskipun partisipasi tetap berlangsung, masih terdapat tantangan representasi dan akses yang perlu diatasi untuk mewujudkan demokrasi yang benar-benar inklusif dan partisipatif.

Kata Kunci : Buruh, Kawasan Industri, Perilaku Pemilih

## **ABSTRACT**

*Workers in industrial areas face various problems, such as unilateral termination of employment (PHK), accelerated retirement, and limited space to voice political aspirations. These conditions are an important background in understanding workers' political behavior, especially in the context of the 2024 General Election. This study aims to describe the voting behavior of workers in industrial areas in the 2024 General Election in Tualang District, Siak Regency. The method used in this study is a descriptive qualitative descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, as well as FGDs with labor unions and documentation of workers in the industrial area of Tualang District, Siak Regency. The main focus of this study is to understand how workers' voting behavior is formed, the extent to which rationality influences their choices, and how working conditions and the position of labor unions contribute to shaping the dynamics of political participation among workers.*

*The results of the study show that the majority of workers vote rationally by considering the vision and mission, work programs, and track records of candidates, as explained in Anthony Downs' Rational Choice theory. However, there is also a tendency to vote based on emotional closeness or local identity, as well as the presence of critical voters who reject money politics. From the perspective of Robert A. Dahl's Polyarchy theory, worker participation is quite inclusive without direct pressure from companies, but political access is still limited due to the lack of polling stations around industrial areas, as well as limited campaign space in the workplace. The conclusion of this study is that labor political behavior in industrial areas is not homogeneous, but rather demonstrates a combination of rationality, pragmatism, and structural limitations. While participation continues, challenges of representation and access remain that need to be addressed to achieve a truly inclusive and participatory democracy.*

*Keywords: Workers, Industrial Areas, Voter Behavior*

## LATAR BELAKANG MASALAH

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama dalam sistem demokrasi modern yang memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan arah kekuasaan politik secara langsung. Melalui pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin, anggota legislatif, serta partai politik yang dianggap mampu mewakili kepentingan mereka. Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, pemilu diselenggarakan secara periodik dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu tidak selalu mencerminkan keterlibatan politik yang merata dari seluruh lapisan masyarakat. Kelompok tertentu, terutama kelas pekerja atau buruh, sering kali berada dalam posisi marginal dalam arena politik. Meskipun secara jumlah populasi sangat signifikan kelompok ini kerap kali menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam menyalurkan hak politiknya secara penuh. Keterbatasan akses informasi politik, beban kerja yang padat, minimnya fasilitas pemilu seperti TPS di kawasan industri, serta lemahnya keterwakilan politik menjadikan buruh sebagai kelompok yang rawan mengalami eksklusi politik.

Kondisi ini relevan untuk dikaji lebih dalam, khususnya dalam konteks kawasan industri yang menjadi pusat konsentrasi tenaga kerja di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu wilayah yang mencerminkan dinamika tersebut adalah Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kawasan ini dikenal sebagai pusat industri pulp dan kertas, dengan kehadiran perusahaan besar seperti PT Indah Kiat Pulp & Paper dan PT Pindo Deli yang menyerap ribuan tenaga kerja dari berbagai daerah, bahkan luar provinsi. Komposisi demografis yang didominasi oleh pekerja/buruh menjadikan wilayah ini sebagai

ruang sosial-politik yang penting untuk diteliti, terutama dalam konteks perilaku memilih pada Pemilu 2024.

Berdasarkan data resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak, Kecamatan Tualang mencatat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tertinggi, yaitu sebanyak 82.832 orang.

**Tabel 1. Jumlah DPT Tahun 2024  
Kabupaten Siak**

No	Kecamatan	Jumlah DPT
1.	Tualang	82.832 suara
2.	Kandis	51.713 suara
3.	Sungai Apit	22.935 suara
4.	Dayun	22.780 suara
5.	Kecamatan Siak	22.710 suara
6.	Minas	20.985 suara
7.	Bunga Raya	19.736 suara
8.	Koto Gasib	16.700 suara
9.	Kerinci Kanan	16.597 suara
10.	Lubuk Dalam	14.275 suara
11.	Mempura	12.318 suara
12.	Sungai Mandau	7.048 suara
13.	Sabak Auh	9.497 suara
14.	Pusako	5.722 suara

Meski demikian, partisipasi pemilih tidak menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan. Bahkan, jika dibandingkan dengan Pemilu 2019, terjadi penurunan tingkat partisipasi sebesar 9 persen. Penurunan ini menjadi anomali mengingat besarnya populasi pemilih di kawasan tersebut, serta latar belakang mereka sebagai kelompok buruh yang selama ini diposisikan sebagai entitas politik yang memiliki kekuatan kolektif.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami perilaku politik buruh tidak sebagai sesuatu yang tunggal dan seragam, melainkan sebagai bentuk tindakan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Latar belakang sosial ekonomi, tingkat pendidikan, akses informasi, kedekatan emosional terhadap kandidat, serta posisi dalam organisasi

seperti serikat pekerja menjadi variabel penting yang membentuk keputusan politik buruh. Selain itu, kondisi kerja yang menuntut jam kerja panjang dan sistem shift juga memengaruhi kemampuan mereka untuk hadir dan menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara.

Penelitian ini memahami fenomena tersebut dengan menggunakan dua pendekatan teoritis utama. Pertama, teori Polyarchy dari Robert A. Dahl, yang menjelaskan demokrasi melalui dua dimensi: kontestasi politik (*political contestation*) dan partisipasi inklusif (*inclusive participation*). Teori ini membantu mengevaluasi sejauh mana lingkungan politik memungkinkan buruh untuk berpartisipasi secara bebas dan kompetitif dalam proses pemilu.

Kedua, teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) dari Anthony Downs, yang menekankan bahwa individu dalam hal ini pemilih akan membuat keputusan politik secara kalkulatif berdasarkan manfaat dan biaya yang akan mereka peroleh. Dalam kerangka ini, buruh dipandang sebagai aktor rasional yang dapat menimbang keuntungan dari setiap pilihan politik, termasuk memilih untuk tidak memilih.

#### **A. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah didalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Perilaku Pemilih Buruh di Kawasan Industri dalam Pemilihan Umum 2024 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?
2. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih Buruh dalam Pemilu 2024 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

#### **B. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan perilaku pemilih buruh dikawasan industri dalam Pemilihan umum 2024 di Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak

2. Untuk Mendeskripsikan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih buruh dalam Pemilu 2024 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

#### **C. TINJAUAN TEORI**

Penelitian mengenai perilaku pemilih buruh dalam Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ini didasarkan pada dua pendekatan teori utama, yaitu teori *Polyarchy* dari Robert A. Dahl dan teori Pilihan Rasional dari Anthony Downs. Kedua teori ini dipilih karena mampu memberikan kerangka konseptual yang komprehensif dalam memahami proses pengambilan keputusan politik di kalangan pemilih, khususnya pemilih dari kelas pekerja atau buruh industri.

##### **1. Teori Polyarchy (Robert A. Dahl)**

Robert A. Dahl dalam bukunya *Polyarchy Participation and Opposition* (1971) mengemukakan bahwa demokrasi modern tidak selalu diwujudkan dalam bentuk ideal, melainkan dalam bentuk institusi yang disebut sebagai *polyarchy* suatu sistem politik di mana terdapat tingkat tinggi dari kontestasi dan partisipasi. Dalam konteks ini, masyarakat diberi hak dan kesempatan yang luas untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik, seperti hak memilih dan dipilih, kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi alternatif, serta kebebasan berserikat.

Dalam penerapannya terhadap penelitian ini, teori *Polyarchy* digunakan untuk melihat sejauh mana pemilih buruh memiliki akses dan kebebasan dalam berpartisipasi secara politik. Aspek partisipasi ini meliputi kemudahan dalam menggunakan hak suara, keterlibatan dalam kampanye, serta akses terhadap informasi politik. Berdasarkan temuan dalam skripsi, buruh di kawasan industri Tualang masih mengalami kendala partisipatif, baik karena tekanan struktural

perusahaan, keterbatasan waktu, maupun minimnya pendidikan politik.

Dahl menegaskan bahwa demokrasi yang baik harus menyediakan ruang partisipasi yang setara bagi semua warga negara. Jika kelompok buruh tidak mendapat akses yang proporsional dalam pemilu, maka dapat dikatakan bahwa demokrasi belum sepenuhnya tercapai dalam bentuk idealnya.

## 2. Teori Pilihan Rasional (Anthony Downs)

Anthony Downs melalui karya monumentalnya "*An Economic Theory of Democracy*" (1957), memperkenalkan pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku pemilih. Menurut Downs, pemilih adalah individu yang rasional dan akan memilih kandidat yang diyakini mampu memberikan keuntungan atau manfaat terbesar baginya. Proses memilih dilihat sebagai keputusan strategis, di mana pemilih membandingkan berbagai alternatif berdasarkan informasi yang tersedia dan memperhitungkan biaya serta manfaat dari masing-masing pilihan.

Dalam konteks pemilih buruh di kawasan industri, teori ini berguna untuk memahami motif rasional di balik keputusan memilih kandidat tertentu. Hasil penelitian dalam skripsi menunjukkan bahwa sebagian besar buruh memilih berdasarkan pertimbangan program kerja, visi dan misi kandidat, serta isu-isu yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja seperti upah, jaminan sosial, dan kondisi kerja.

Namun, teori ini juga menunjukkan bahwa perilaku rasional hanya mungkin terjadi jika pemilih memiliki akses yang cukup terhadap informasi politik dan tidak berada dalam tekanan. Dalam kenyataannya, tidak semua buruh bertindak sepenuhnya rasional. Ada juga yang memilih secara emosional atau karena pengaruh lingkungan sosial, yang menunjukkan keterbatasan teori ini dalam menjelaskan perilaku pemilih

secara holistik.

## 3. Teori Bounded Rationality dan Perilaku Politik Irasional

Teori ini dikemukakan oleh Herbert A. Simon (1957) sebagai bentuk kritik terhadap pendekatan Pilihan Rasional yang dianggap terlalu ideal dan menyederhanakan proses pengambilan keputusan manusia. Dalam teori Pilihan Rasional, diasumsikan bahwa individu mampu berpikir secara logis, mempertimbangkan semua alternatif, serta membuat pilihan terbaik berdasarkan informasi yang lengkap. Namun, menurut Simon, kondisi ideal tersebut jarang terjadi dalam kenyataan. Dalam praktiknya, manusia memiliki banyak keterbatasan dalam berpikir dan bertindak, terutama ketika harus membuat keputusan yang kompleks seperti dalam pemilu.

Herbert Simon menyebut kondisi ini sebagai *bounded rationality* atau rasionalitas terbatas. Artinya, manusia memang berusaha bertindak rasional, tetapi kemampuannya untuk melakukannya dibatasi oleh tiga hal utama:

- a) Informasi yang dimiliki tidak lengkap.
- b) Waktu yang tersedia sangat terbatas.
- c) Kemampuan berpikir dan mengolah informasi yang juga terbatas.

Tiga keterbatasan inilah, Simon menyatakan bahwa manusia tidak selalu mengambil keputusan yang paling menguntungkan, sebagaimana diasumsikan oleh teori rasional. Sebaliknya, manusia cenderung mengambil keputusan yang cukup memuaskan istilah yang dikenal sebagai *satisficing*. Keputusan ini dianggap cukup baik menurut pemahaman dan sumber daya yang mereka miliki saat itu, meskipun belum tentu merupakan keputusan terbaik.

Dalam konteks perilaku pemilih, *bounded rationality* menjelaskan seorang buruh bisa memilih kandidat legislatif hanya karena calon tersebut sering hadir di lingkungan mereka, dikenal secara

personal, atau berasal dari kampung yang sama bukan karena mempertimbangkan program atau visi politiknya. Pemilih membuat keputusan bukan dengan logika politik yang utuh, tetapi dengan mengandalkan informasi terbatas dan pertimbangan sosial-emosional.

**D. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai perilaku pemilih buruh di kawasan industri dalam Pemilihan Umum 2024, khususnya di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan secara rinci realitas sosial dan politik yang dialami oleh buruh sebagai subjek penelitian, termasuk motif, pemahaman, serta konteks struktural yang memengaruhi perilaku memilih mereka.

**E. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Perilaku Pemilih Buruh di Kawasan Industri dalam Pemilihan Umum 2024 Kecamatan Tualang Kabupaten**

Perilaku pemilih buruh di Kecamatan Tualang menunjukkan dinamika tersendiri yang berkaitan erat dengan struktur kerja industri, keterlibatan organisasi serikat pekerja, serta preferensi individual yang dipengaruhi oleh informasi dan pengalaman pribadi. Sebagai wilayah yang memiliki kawasan industri cukup padat, Kecamatan Tualang dihuni oleh ribuan pekerja dari berbagai latar belakang, dengan mayoritas merupakan buruh pabrik yang bekerja dalam sistem kerja tiga shift dan jam kerja yang padat.

**Tabel 2. Sistem Kerja Shift**

Shift pagi	07.00-15.00
Shift sore	15.00-23.00
Shift malam	23.00-07.00

Jadwal kerja yang padat ini menjadi tantangan tersendiri bagi buruh dalam berpartisipasi dalam proses politik,

khususnya dalam menggunakan hak pilih saat Pemilu 2024. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa mayoritas buruh tetap menggunakan hak pilihnya, menunjukkan adanya kesadaran politik yang cukup kuat di tengah keterbatasan waktu dan beban kerja.

Peran organisasi serikat pekerja turut menjadi faktor pendukung, terutama dalam menyampaikan informasi politik dan memfasilitasi diskusi internal di kalangan anggota. Selain itu, preferensi individual yang dipengaruhi oleh akses informasi melalui media sosial dan pengalaman pribadi juga membentuk keputusan politik yang lebih rasional. Hal ini tercermin dari hasil wawancara terhadap 29 informan, di mana 24 di antaranya menyatakan bahwa mereka memilih berdasarkan pertimbangan rasional seperti visi-misi, program kerja, dan integritas calon, bukan karena tekanan, iming-iming, atau loyalitas buta terhadap partai politik.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar buruh bersikap sebagai Peemilih rasional, sesuai dengan teori *Rational Choice* dari Anthony Downs. Namun, ditemukan 5 informan buruh yang memilih karena faktor emosional atau kedekatan pribadi dengan kandidat, tanpa mempertimbangkan kualitas program yang ditawarkan.

Meskipun tidak ada tekanan langsung dari perusahaan terhadap pilihan politik buruh, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi buruh belum sepenuhnya bebas dari hambatan struktural, seperti ketiadaan TPS di sekitar kawasan industri, sistem kerja shift, serta larangan kampanye di lingkungan kerja. Dalam hal ini, pembahasan perilaku politik buruh dianalisis melalui dua dimensi utama dari teori Polyarchy, yaitu kontestasi politik dan partisipasi inklusif.

### **a. Kontestasi Politik (*Public Contestation*)**

Dimensi kontestasi politik dalam teori *Polyarchy* yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl menunjukkan pada keberadaan ruang yang terbuka dan bebas bagi warga negara untuk mengekspresikan preferensi politiknya, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat, berorganisasi, serta memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dalam konteks ini, kontestasi tidak hanya berarti ketersediaan pilihan politik, tetapi juga mencakup sejauh mana individu dan kelompok memiliki akses terhadap informasi politik, mampu terlibat dalam diskursus publik, serta tidak mengalami tekanan atau paksaan dalam menentukan pilihan politik.

Dari sisi pilihan politik, buruh tidak menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap partai tertentu. Dalam FGD, perwakilan SP IKPP menyatakan bahwa mereka memilih berdasarkan rekam jejak calon, bukan berdasarkan partai. Sementara itu, SP IKPP Perjuangan menunjukkan orientasi politik yang lebih aktif, bahkan mendorong anggotanya untuk mencalonkan diri sebagai legislatif. Namun demikian, keterlibatan serikat pekerja dalam kontestasi politik masih bersifat personal dan belum terlembaga secara kolektif.

Dimensi kontestasi politik dalam konteks perilaku pemilih buruh di Kecamatan Tualang dapat dikatakan hadir dalam bentuk formal (hak memilih dan tidak adanya paksaan), namun secara substantif masih terbatas oleh minimnya ruang dialog politik, larangan kampanye di lingkungan kerja, dan rendahnya intensitas politik organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kontestasi politik belum sepenuhnya optimal dalam mendukung kualitas demokrasi poliarki di kalangan buruh industri.

### **b. Partisipasi Inklusif (*Inclusive Participation*)**

Dimensi partisipasi inklusif dalam teori *Polyarchy* mengacu pada sejauh mana semua warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik. Ini mencakup hak untuk memilih dan dipilih, serta akses terhadap informasi dan fasilitas politik yang memadai untuk memastikan keterlibatan yang adil dan menyeluruh.

Dari sisi partisipasi, mayoritas buruh memiliki semangat untuk menyalurkan hak pilih. Namun, beberapa kendala struktural turut memengaruhi partisipasi mereka. Pertama, tidak tersedianya TPS di dalam kawasan industri menyebabkan buruh harus pulang ke alamat KTP untuk mencoblos. Hal ini cukup menyulitkan, terutama bagi buruh shift malam atau yang tinggal jauh dari TPS. Kedua, meskipun KPU telah mengeluarkan surat edaran yang mengizinkan buruh mencoblos, implementasi di lapangan bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.

Partisipasi juga dipengaruhi oleh kesadaran politik individu. Sebagian buruh menyatakan bahwa memilih adalah bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Namun, ada juga yang merasa bahwa suara mereka tidak berdampak apa-apa, terutama karena tidak adanya perubahan signifikan pasca-pemilu yang dirasakan langsung oleh buruh. Ini menandakan bahwa meskipun formalitas partisipasi tetap tinggi, substansi partisipasi masih lemah.

Dalam perspektif *Polyarchy*, kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi buruh di Kecamatan Tualang tergolong cukup inklusif secara prosedural, tetapi belum optimal secara substansial. Mereka memiliki hak pilih dan bebas dari intimidasi, tetapi akses terhadap pelaksanaan hak tersebut masih terkendala oleh kondisi kerja, regulasi perusahaan, dan minimnya pendidikan politik yang mereka terima.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempenga-**

## ruhi Perilaku Pemilih Buruh dalam Pemilihan Umum 2024 Kecamatan Tualang

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat lima faktor dominan yang memengaruhi perilaku memilih buruh di Kecamatan Tualang:

### 1. Tidak tersedianya TPS di sekitar Kawasan Industri

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah ketiadaan TPS di dalam atau sekitar kawasan industri tempat para buruh bekerja. Meskipun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Tualang merupakan yang tertinggi di Kabupaten Siak, para buruh tetap harus mencoblos di TPS yang sesuai dengan alamat KTP masing-masing. Dengan sistem kerja yang padat, serta banyaknya buruh perantau yang tidak tinggal di sekitar lokasi kerja, hal ini menciptakan hambatan nyata bagi partisipasi politik.

Salah satu hambatan utama yang dirasakan oleh buruh adalah tidak adanya TPS khusus di dalam kawasan industri. KPU Siak menyampaikan bahwa penempatan TPS tetap mengacu pada alamat KTP, bukan tempat kerja. Akibatnya, banyak buruh harus menempuh jarak yang jauh atau menyesuaikan dengan jadwal kerja untuk dapat memberikan suara. Hal ini menyulitkan terutama bagi buruh yang bekerja dengan sistem shift atau tinggal jauh dari TPS.

Dalam konteks teori demokrasi, khususnya konsep partisipasi efektif yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl dalam teori poliarki, hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun hak pilih secara hukum dijamin, pelaksanaannya masih menghadapi kendala praktis yang menghambat keterlibatan aktif kelompok buruh dalam proses demokrasi elektoral

### 2. Minimnya Akses Waktu dan Fleksibilitas Kerja

KPU Siak telah menyurati perusahaan

untuk memberikan izin untuk buruh dapat menggunakan hak suaranya. Kemudian Perusahaan juga memberikan kembali edaran kepada buruh pada saat pemilu 2024.

**Gambar 1. Surat Edaran dari Perusahaan**



Adanya surat edaran ini memperlihatkan bahwa perusahaan tidak menghalangi karyawannya dalam menggunakan hak pilih. Sebaliknya, kebijakan ini mendukung terciptanya ruang politik yang inklusif di lingkungan kerja. Dengan demikian, surat ini menjadi salah satu indikator bahwa partisipasi buruh dalam pemilu juga ditentukan oleh adanya dukungan kelembagaan dari pihak perusahaan.

Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa karyawan yang terjadwal masuk tetap bekerja seperti biasa sesuai jadwal shift masing-masing. Namun, tanggung jawab oleh atasan untuk mengatur waktu pelaksanaan penggunaan hak pilih secara bergantian, agar tidak mengganggu proses produksi perusahaan.

Hal ini mencerminkan upaya perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kelangsungan operasional pabrik dan hak demokratis pabrik. Hal tersebut memperlihatkan bahwa meskipun buruh berada dalam sistem kerja yang padat. Akses terhadap pemilu tetap dijaga dan tidak dihambat oleh kebijakan perusahaan. Sehingga

mendorong partisipasi yang inklusif yang menjadi prinsip-prinsip demokrasi partisipatif.

### **3. Larangan Kampanye Politik di Area Pabrik**

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) bersama dua serikat pekerja, yaitu SP IKPP dan SP IKPP Perjuangan, diketahui bahwa aktivitas kampanye politik secara tegas dilarang dilakukan di dalam lingkungan pabrik. Pelarangan ini diberlakukan atas dasar pertimbangan menjaga netralitas tempat kerja serta mencegah potensi gangguan terhadap kelancaran proses produksi. Dalam konteks industri, produktivitas dan stabilitas operasional merupakan prioritas utama perusahaan, sehingga segala bentuk aktivitas yang dianggap dapat menimbulkan perpecahan atau konflik kepentingan di antara pekerja, termasuk kampanye politik, dianggap perlu dihindari.

### **4. Ketidakpercayaan terhadap partai politik**

Faktor terakhir yang sangat mempengaruhi perilaku pemilih buruh adalah rendahnya kepercayaan terhadap partai politik. Sebagian besar buruh yang diwawancarai menyatakan kekecewaan terhadap partai-partai yang hanya hadir menjelang pemilu dan tidak pernah kembali setelah terpilih. Buruh merasa bahwa partai politik belum benar-benar memperjuangkan isu-isu yang mereka hadapi, seperti upah layak, jaminan sosial, PHK sepihak, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi.

Kondisi ini menimbulkan sikap apatis dan skeptis di kalangan buruh. Beberapa memilih kandidat bukan karena visi atau partainya, melainkan karena kedekatan personal, asal daerah yang sama, atau janji bantuan langsung. Bahkan ada pula yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilih sama sekali (golput) karena merasa tidak ada perubahan yang berarti dari pemilu ke pemilu.

Fenomena ini menunjukkan lemahnya afiliasi politik (party identification) di kalangan buruh, serta memperkuat kecenderungan perilaku memilih yang personalistik dan pragmatis. Dalam konteks teori Pilihan Rasional, keputusan untuk tidak memilih atau memilih tanpa pertimbangan program adalah hasil dari kalkulasi bahwa manfaat memilih lebih kecil daripada biaya atau usaha yang dikeluarkan. Artinya, keputusan politik buruh bukan semata-mata karena ketidaktahuan, tetapi juga karena kekecewaan yang mendalam terhadap sistem politik yang dirasa tidak memberi keuntungan konkret bagi mereka.

### **3. Faktor Pendorong Partisipasi Politik Buruh dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Tualang**

Meskipun terdapat sejumlah kendala struktural dan kultural yang menghambat partisipasi politik buruh, penelitian ini juga menemukan adanya berbagai faktor pendorong yang secara signifikan mendorong sebagian besar buruh tetap menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu 2024. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa kesadaran dan motivasi politik tidak sepenuhnya hilang di kalangan kelas pekerja, melainkan terus tumbuh melalui berbagai saluran sosial dan personal.

#### **1. Kesadaran Individu terhadap Hak Politik**

Faktor paling mendasar yang mendorong partisipasi politik buruh adalah kesadaran individu mengenai pentingnya menggunakan hak suara sebagai warga negara. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka memilih karena merasa bertanggung jawab untuk ikut menentukan arah pemerintahan. Kesadaran ini muncul dari pemahaman bahwa suara mereka bukan hanya hak, tetapi juga bentuk kontribusi terhadap perubahan sosial dan politik.

Kesadaran politik semacam ini tumbuh secara gradual, baik dari pengalaman pribadi maupun pendidikan informal di

lingkungan kerja dan organisasi. Meskipun tidak semua buruh memiliki latar belakang pendidikan politik formal, kesadaran kolektif akan pentingnya pemilu menjadi modal dasar dalam meningkatkan partisipasi.

## **2. Akses Informasi Politik melalui media sosial**

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah membuka ruang baru bagi buruh untuk mengakses informasi politik secara cepat dan luas. Facebook, Instagram, dan TikTok menjadi sumber utama bagi sebagian besar buruh dalam mengenal calon legislatif, program kerja partai, serta isu-isu politik nasional dan lokal.

Meskipun informasi yang diterima tidak selalu lengkap atau netral, media sosial memberikan alternatif atas keterbatasan informasi di lingkungan kerja. Akses digital ini memperluas wawasan politik buruh dan memberikan mereka kemampuan untuk membandingkan kandidat serta melakukan pilihan berdasarkan informasi yang tersedia. Dengan kata lain, media sosial telah menjadi sarana penting dalam mengaktifkan kesadaran politik buruh secara mandiri.

## **3. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Ekonomi**

Lingkungan sosial seperti keluarga, teman kerja, dan komunitas tempat tinggal juga memengaruhi keputusan politik buruh. Dalam banyak kasus, buruh cenderung mendiskusikan pilihan politik mereka secara informal dengan sesama rekan kerja atau tetangga. Diskusi ini memunculkan efek psikologis berupa dorongan untuk tidak ketinggalan atau merasa ikut terlibat dalam peristiwa penting seperti pemilu.

Selain itu, faktor emosional juga memainkan peran penting, terutama ketika calon legislatif berasal dari latar belakang yang dekat secara sosial atau geografis dengan buruh. Ikatan asal daerah, kesamaan

pengalaman hidup, atau kepedulian terhadap isu-isu lokal menjadi alasan kuat bagi buruh untuk memilih calon tertentu. Dalam konteks ini, partisipasi tidak hanya rasional, tetapi juga bersifat afektif

## **4. Keyakinan Bahwa suara Buruh bisa menentukan arah kebijakan**

Sebagian buruh memiliki keyakinan bahwa suara mereka dapat memengaruhi arah kebijakan, terutama dalam isu-isu yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka, seperti kenaikan upah, perlindungan kerja, dan jaminan sosial. Keyakinan ini mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif, meskipun mereka tidak selalu memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu.

Beberapa buruh menyampaikan harapan bahwa dengan memilih kandidat yang memperhatikan aspirasi buruh, mereka dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak. Harapan ini menjadi motivasi politik yang mendorong buruh untuk tetap ikut serta dalam proses pemilu, meskipun realitas politik kadang tidak sesuai ekspektasi.

## **5. Aktivitas Serikat Pekerja yang mendukung partisipasi**

Peran serikat pekerja dalam membangun kesadaran politik di kalangan anggotanya sangat signifikan. Serikat pekerja seperti SP IKPP dan SP IKPP Perjuangan menyediakan ruang diskusi, edukasi politik, dan bahkan mendorong anggotanya untuk terlibat aktif dalam proses pemilu. Dalam beberapa kasus, serikat pekerja juga menjadi jembatan antara buruh dan kandidat politik, meskipun tidak secara langsung terafiliasi dengan partai tertentu.

Anggota serikat cenderung memiliki informasi yang lebih baik tentang proses pemilu dan lebih kritis dalam menentukan pilihan politik. Kegiatan internal seperti rapat rutin, diskusi tematik, atau penyebaran informasi tentang pemilu berkontribusi besar

terhadap peningkatan partisipasi politik. Serikat pekerja bukan hanya organisasi advokasi ketenagakerjaan, tetapi juga menjadi agen politik yang penting di kalangan buruh industri.

## **F. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pemilih buruh di kawasan industri Kecamatan Tualang dalam Pemilu 2024 dibentuk oleh kombinasi antara rasionalitas individu, hambatan struktural, dan dinamika sosial di lingkungan kerja. Sebagian besar buruh menggunakan hak pilih secara sadar dan rasional, dengan mempertimbangkan visi-misi, program kerja, dan rekam jejak kandidat. Namun, masih ditemukan perilaku memilih yang emosional dan bersifat personalistik, terutama pada buruh yang kurang terpapar informasi politik.

Faktor-faktor yang menghambat partisipasi politik buruh mencakup: tidak tersedianya Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kawasan industri, sistem kerja shift yang membatasi waktu mencoblos, larangan kampanye politik di dalam pabrik, dan rendahnya kepercayaan terhadap partai politik. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun hak politik dijamin secara formal, pelaksanaannya belum sepenuhnya inklusif.

Di sisi lain, partisipasi politik buruh tetap terdorong oleh sejumlah faktor, antara lain: kesadaran individu terhadap pentingnya hak politik, akses informasi melalui media sosial, pengaruh lingkungan sosial dan emosional, keyakinan terhadap nilai suara buruh, serta peran aktif serikat pekerja dalam mendorong partisipasi. Adanya surat edaran dari perusahaan yang memberi izin mencoblos turut menjadi dukungan simbolik terhadap pemenuhan hak pilih buruh.

Dalam perspektif teori Polyarchy Robert A. Dahl dan Pilihan Rasional Anthony Downs, temuan ini mengindikasikan bahwa

perilaku politik buruh merupakan hasil interaksi antara kapasitas rasional individu dan kondisi kelembagaan yang mendukung atau menghambat partisipasi. Dengan demikian, demokrasi elektoral di kawasan industri belum sepenuhnya substansial jika tidak disertai dengan dukungan struktural dan politik yang adil terhadap kelas pekerja.

### **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka beberapa saran yang dapat diajukan sebagai implikasi praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Kepada penyelenggara Pemilu KPU perlu adanya upaya peningkatan fasilitas bagi pemilih di kawasan industri, terutama dalam hal penempatan TPS yang lebih mudah diakses oleh buruh.

*Kedua*, kepada serikat pekerja diharapkan dapat menjadi jembatan informasi politik yang netral dan objektif bagi para anggotanya. Meskipun netralitas organisasi penting dijaga, edukasi politik berbasis kepentingan buruh dapat dilakukan melalui diskusi atau forum internal tanpa harus berpihak secara kelembagaan. Hal ini sejalan dengan peran strategis serikat dalam demokrasi deliberatif.

*Ketiga*, kepada partai politik dan calon legislatif penting untuk membangun komunikasi politik yang substantif dengan kelompok buruh, dengan cara menyampaikan program yang nyata, transparan, dan sesuai kebutuhan buruh. Meningkatkan keterwakilan buruh di lembaga legislatif tidak cukup hanya dengan label partai atau identitas kelas, melainkan perlu dibuktikan dengan aksi nyata dan keberpihakan terhadap isu-isu ketenagakerjaan.

*Keempat*, kepada peneliti selanjutnya penelitian ini masih terbatas pada satu wilayah kecamatan dan fokus pada buruh di dua serikat pekerja. Peneliti lain disarankan untuk memperluas cakupan wilayah serta membandingkan dengan kawasan industri lain, guna memperoleh

gambaran lebih menyeluruh tentang perilaku politik buruh di Indonesia. Pendekatan kuantitatif atau mixed-method juga dapat dikembangkan untuk mengukur kecenderungan perilaku secara statistik.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

Badan Pusat Statistika Kabupaten Siak, Kecamatan Tualang dalam Angka Tualang *District in figures* 2024.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press.

Downs, A. (1957). *An economic theory of democracy*. Harper and Row, 28.

Efriza. 2012. *Political Explore (Sebuah Kajian Ilmu Politik)*. Bandung: Alfabeta Sahir, S.H. (2021). *Metode penelitian*. Penerbit KBM Indonesia

Firmanzah. (2012). *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Edisi Kedua. Jakara: Yayasan Obor Indonesia

FREDERICK ENGELS. (1844). *The Condition of the Working Class in England*.

Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. ISBN: 979-8433-64-0

##### Jurnal :

Anton. (2013). *Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik* (Vol. 11, Issue 1). <http://arahkiri2009>.

Arza, A., Lestari, Y. S., Chadijah, D. I., & Sariyanti, L. (2024). *PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM*

*LEGISLATIF 2019 DI GAMPONG TAMPANG KECAMATAN SAMADUA KABUPATEN ACEH SELATAN*. 4(2).

Asfar, Muhammad. 2002. *Model Model Pemilihan Di Indonesia*. Surabaya: Pushedam

Azzahra. *Perilaku Pemilih dan Pilpres Studi Pengaruh Perilaku Pemilih Terhadap Pemilihan Presiden 2019 di Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur*

Bisri, A Zaini;. "Partisipasi Politik Dalam Keterbukaan Informasi Publik Studi kasus interaksi pattiro dengan pemerintah Kota Semarang." 2020: 3-4.

Efriza, Dkk. 2006. *Mengenal Teori-teori Politik*, Bandung: Nuansa

Fajriani Ismi Noor. (2024). *PENGARUH INFORMASI POLITIK DI MEDIA SOSIAL TIKTOK DAN X TERHADAP PERILAKU MEMILIH BURUH PABRIK DI KECAMATAN CIKARANG BARAT PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2024*.

Fikry Maulana Hidayatullah. (2019). *BURUH DAN PARTISIPASI POLITIK (Analisis Kekalahan Obon Tabroni Sebagai Calon Independen Pada Pilkada Kabupaten Bekasi 2017)*.

Kamajaya, R. S. (2021). *PERILAKU PEMILIH (STUDI PILIHAN PARTAI POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF DAPIL BANTEN III TAHUN 2019)*.

Kristiadi, J. (1994). *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia: Suatu Studi Kasus tentang Perilaku Pemilih di Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Pemilihan Umum tahun 1987-1992*. Universitas Gajah Mada

Kumurur, R. (2015). *Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Komisi Pemilihan*

- Umum (KPU) Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. *Lex Et Societatis*, 3(10), 130-139.
- Mas'udi, M., Qodarsasi, U., & Dewi, N. R. (2018). Perilaku Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 2(2), 169–188.  
<https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.2.3038>
- Patty, A. N., Martini, R., Hidayat, N., Politik, M. I., & Diponegoro, U. (2022). *PENGARUH TRANSFORMASI PERAN PEREMPUAN DAN SENSITIVITAS GENDER TERHADAP PERILAKU MEMILIH BURUH PEREMPUAN PLASMA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PURBALINGGA 2020*.
- Pradhanawati, Ari., (2018). Peran Buruh Perempuan Dalam Keluarga (Buku Monograf). Yogyakarta: Amazing Books
- Pradhanawati, Ari. (2016). Perilaku Pemilih di Kalangan Buruh: Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2013. Semarang: EF Press Digimedia.
- Rif'an, F. A. (2020). Politik Identitas dan Perilaku Pemilih pada Pilpres 2019: Studi di Kota Palembang Sumatera Selatan. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 2(2), 83–100.  
<https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8499>
- Roth, Dieter, 2008. Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-Teori, Instrumen dan Metode. Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo
- Utaminingsih, S., Hendri, & Rachmawaty, S. (2023). Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Warga Negara Di Desa Kuripan Ciseeng Bogor. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 181-193.
- Peraturan dan Perundang-Undangan:**
- Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, Presiden Republik. "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 19989 tentang Kawasan Industri." Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia (1989)
- Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, Presiden Republik. "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri." Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia (1996)

### Website

A company of App. (2024). *Tentang Indah Kiat Perawang*. Indah Kiat Pulp and Paper. <https://indahkiat.co.id/in/indahkiat-perawang>

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SIAK. (2024, September). *Kecamatan Tualang Dalam Angka 2024*. BPS KAB-SIAK. <https://siakkab.bps.go.id/id>

Cekdpt. (2024). *Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2024*. Cek Dpt Online. <https://cekdptonline.kpu.go.id/>

KPU Kabupaten Siak. (2024). *Visi Misi KPU Kabupaten Siak*. KPU KAB-SIAK. <https://kab-siak.kpu.go.id/page/read/visi-misi-kpu-kabupaten-siak>

PPID KAB SIAK. (2021). *VISI DAN MISI PPID KABUPATEN SIAK*. PPID KABUPATEN SIAK. <https://ppid.siakkab.go.id/visi-misi>

WIKIPEDIA. (2024, November). *Buruh*. WIKIPEDIA Ensiklopedia Bebas. <https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh>

WIKIPEDIA. (2025, May). *Perawang, Tualang, Siak*. WIKIPEDIA Ensiklopedia Bebas. [https://id.wikipedia.org/wiki/Perawang,\\_Tualang,\\_Siak](https://id.wikipedia.org/wiki/Perawang,_Tualang,_Siak)